



PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN ASET PASCA PON XX DAN PEPARNAS XVI TAHUN 2021 PROVINSI PAPUA

DIKLAT DATA ANALYTIC UNTUK APP



RIZKA YUDISTIRA FERLYANTO
19890711 201012 1 001

Perwakilan BPKP Provinsi Papua

DAFTAR ISI

BAB I DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN	2
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan	2
B. Identitas Obyek Pengawasan	3
C. Matrik Desain Pengawasan	3
BAB II KEGIATAN ANALISIS DATA	4
A. Kegiatan Analisis Data	4
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya	5
BAB III PENUTUP	7

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Langkah, Membangun Daerah” salah satunya adalah Pengawasan atas Pengelolaan Aset Pasca Penyelenggaraan PON XX dan PEPARANS XVI Tahun 2021.

Anggaran telah dikeluarkan dari APBN untuk pembangunan berbagai venue. Selain pembangunan venue pertandingan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua juga telah menghibahkan dana senilai Rp3.146.619.377.512,00 (APBN Rp715.438.976.000,00 dan APBD Provinsi Papua Rp2.431.180.401.512,00) kepada PB PON XX dan dana senilai Rp891.430.599.000,00 (APBN Rp116.430.599.000,00 dan APBD Provinsi Papua Rp775.000.000.000,00) kepada PB PEPARNAS XVI sejak tahun 2016-2021 guna mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan (games time) PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021. Dari dana hibah APBN dan APBD tersebut terdapat pembelian peralatan dan mesin serta peralatan lainnya yang digunakan oleh PB PON XX dan PB PEPARNAS XVI untuk melaksanakan kegiatan operasional dan mendukung pelaksanaan pertandingan.

Saat ini proses hibah seluruh aset baik yang bersumber dari APBN dan APBD masih belum selesai seluruhnya. Dalam rangka proses penyerahan (hibah) atas aset-aset tersebut juga belum diketahui apakah sudah dilakukan inventarisasi dan pencatatan secara tertib baik oleh PB PON XX, PB PEPARNAS XVI, maupun oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Proses hibah seluruh aset PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua harus dimulai dengan kegiatan inventarisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data berupa klasifikasi, kuantitas, kualitas, kondisi, keberadaan (lokasi), dan nilai wajar aset hibah. Hal ini penting dilakukan agar Pemerintah Provinsi Papua memiliki data aset PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 secara lengkap yang nantinya akan disiapkan anggaran pemeliharaan dan dikelola lebih lanjut untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Papua dan kesejahteraan

rakyat Papua pada umumnya. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya penatausahaan dan proses hibah, serta penyiapan rencana kebijakan pengelolaan atas aset-aset tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Papua berinisiatif untuk melakukan pengawasan

B. Identitas Obyek Pengawasan

PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 diselenggarakan di Provinsi Papua, Lokasi venue dan penyelenggaraannya terbagi pada 4 (empat) klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke, namun berpusat pada Kabupaten Jayapura.

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian/ Lembaga/Gubernur Papua/Walikota dan Bupati penyelenggara PON XX dan PEPARNAS XVI tahun 2021 agar mengambil langka-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

C. Matrik Desain Pengawasan

No	Pertanyaan Pengawasan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan
1	Apakah telah dilakukan pengelolaan terhadap Aset pasca PON dan Peparnas?	1. Regulasi/kebijakan pengelelolaan aset 2. Data penatausahaan aset yang terkait klasifikasi, kuantitas, kualitas, kondisi, lokasi dan nilai wajar aset.	1. Document review 2. Interview 3. Survei lapangan	Analisis Deskriptif
2	Apakah proses hibah aset telah selesai dilaksanakan?	1. Dokumen BA Hibah 2. Data aset yang belum dan telah dihibahkan.	1. Document review 2. Interview	Analisis Deskriptif

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-296/PW 26/3.1/2022 tanggal 5 April 2022, Tim melaksanakan Monitoring Tata Kelola Aset Pasca Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI di Cluster Kota dan Kabupaten Jayapura Tahun 2022. Kegiatan monitoring tersebut yaitu memperoleh informasi mengenai kebijakan dan implementasinya terkait penatausahaan, data aset, penyerahan hibah, dan rencana strategis pengelolaan, serta rencana pemanfaatan aset pasca penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021. Tim juga melakukan monitoring fisik ke lapangan atas bangunan venue, peralatan olah raga, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Terdapat beberapa permasalahan yang didapat dari hasil monitoring antara lain:

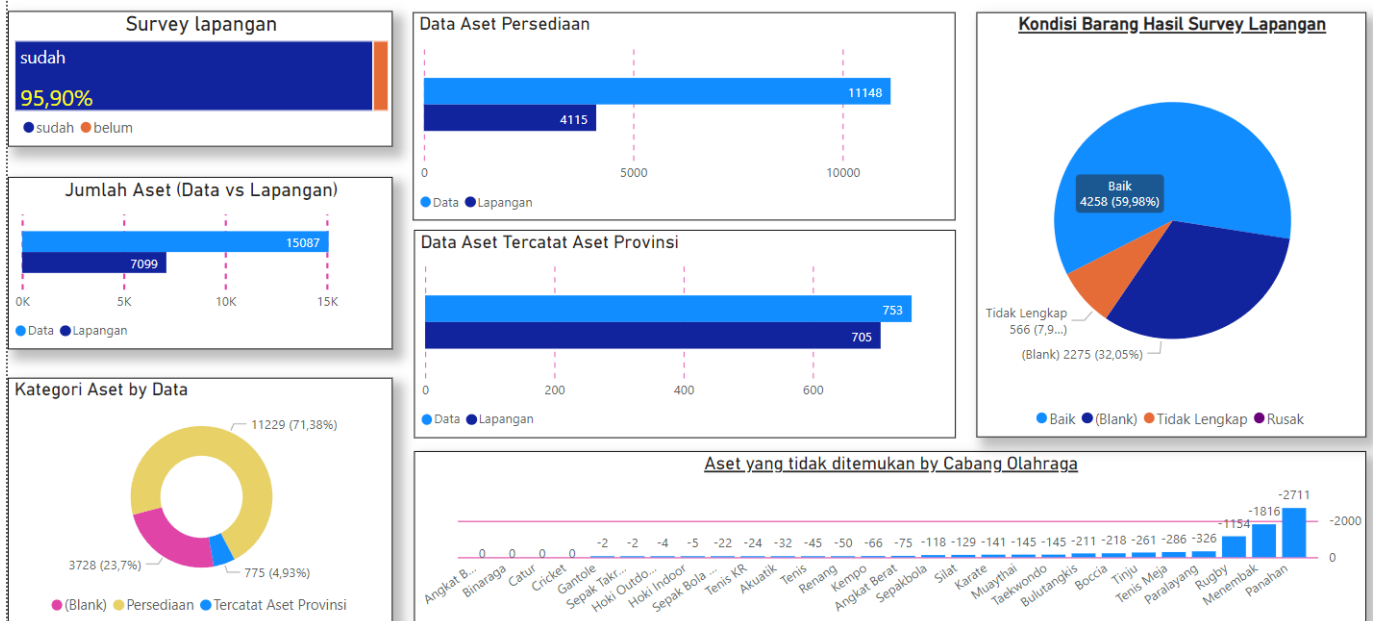
- 1) Beberapa venue di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dijumpai kondisi bahwa venue-venue tersebut tidak terawat dan mengalami beberapa kerusakan, yang jika tidak segera ditangani akan semakin memperparah kondisi tersebut;
- 2) Terdapat venue dan wisma yang bersumber dana dari APBN dan APBD Pemerintah Provinsi Papua belum dihibahkan yang mengakibatkan tidak tersedianya biaya keamanan dan perawatan venue yang besar yang beresiko pada kerusakan venue tersebut;
- 3) Belum ada penetapan bentuk Manajemen Organisasi Pengelola Dan Pemanfaatan Venue Olahraga Pasca PON XX dan PEPARNAS XVI agar dapat segera dikelola secara profesional dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat;
- 4) Kurangnya Alokasi Anggaran untuk Biaya Pemeliharaan Venue karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi berdasarkan kajian dari Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua sebesar Rp43.645.000.000,00/tahun;
- 5) Terdapat Meubelair senilai Rp2.549.772.500,00 yang tidak dimanfaatkan karena sampai dengan monitoring berlangsung barang tersebut masih tersimpan di Gudang Penyedia Barang;
- 6) PB PON XX melakukan kerjasama dengan LK2AED untuk pendataan/ inventarisasi aset, namun pencatatan dilakukan masih terbatas berdasarkan dokumen kontrak;

- 7) Belum terdapat kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset PB PON XX dan PEPARNAS XVI yang bersumber dari Hibah APBD Pemerintah Provinsi Papua;
- 8) Masih terdapat tuntutan ganti rugi oleh masyarakat adat atas lahan Venue Dayung yang belum terselesaikan.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

Atas hasil monitoring fisik/survey lapangan untuk peralatan pendukung olah raga, didapatkan hasil sebagai berikut:

Dashboard Analisa Data Aset Peralatan PON & Peparnas Papua Tahun 2021 pada Klaster Kab/Kota Jayapura



- 1) Telah dilakukan survey lapangan atas 15.087 barang dari 15.732 barang atau sebesar 95,90%. Terdapat barang yang belum dilakukan survey lapangan disebabkan oleh sulitnya mengidentifikasi jenis barang dan lokasi terakhir barang tersebut berada.
- 2) Jumlah barang yang ditemukan ketika survey ke lapangan sebesar 7.098 barang dari 15.087 barang atau sebesar 47,05%.
- 3) Barang yang tidak ditemukan di lapangan sangat banyak disebabkan oleh banyaknya aset persediaan mencapai 71,38% yang dapat habis ketika digunakan penyelenggaraan olah raga.

- 4) Dari sejumlah 11.148 barang persediaan yang dilakukan survey lapangan hanya tersisa 4.115 barang atau sebesar 36,91%.
- 5) Terdapat barang yang telah dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 753 barang namun hanya ditemukan sebanyak 705 atau sebesar 93,63%.
- 6) Seluruh barang yang ditemukan kondisinya baik sebesar 59,98%, tidak ada kondisi sebesar 32,05%, tidak lengkap sebesar 7,92%, dan rusak sebesar 0,05% (4 unit).\
- 7) Banyaknya barang yang tidak ditemukan terdapat pada cabang olah raga Panahan dan Menembak yaitu papan target karena sudah habis digunakan ketika penyelenggaraan olah raga.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, sebaiknya kepada pihak-pihak terkait terutama PB PON XX dan PB PEPARNAS XVI agar dapat segera melakukan koordinasi terkait perawatan/perbaikan atas venue yang sudah mulai rusak, melakukan percepatan proses hibah kepada penerima hibah, menetapkan bentuk manajemen organisasi pengelola dan pemanfaatan Venue Olahraga Pasca PON XX dan PEPARNAS XVI, menyusun penatausahaan atas aset berdasarkan data kontrak yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, serta menyusun kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset sehingga dapat dikelola dan digunakan dengan baik serta dirasakan oleh masyarakat pecinta olah raga.